



WISATA BATU KAPAL: Wisatawan menikmati suasana alami bernuansa tebing indah di Batu Kapal, Klenggotan, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Selasa (22/9). Saat masa pandemi Covid-19, lokasi ini menjadi tempat tamasya alternatif yang tak pernah sepi dikunjungi masyarakat.

KR-Surya Adi Lesmana

Meski Tren Positif Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Baru 36,5 Persen

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga 16 September 2020 realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru mencapai 36,6 persen atau sebesar Rp 254,4 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 695 triliun.

"Terjadi akselerasi terus menerus sejak Agustus-September waktu seluruh kementerian/lembaga (KL) diminta untuk meningkatkan kemampuan pe-

nyerapan anggarannya," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (22/8).
Dikatakan, pun melan-

jutkan akan terus memonitor anggaran PEN agar tepat sasaran. Hal ini untuk membantu

* Bersambung hal 7 kol 5

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional	
Alokasi	Rp 695 triliun
Realisasi	Rp 254,4 triliun
Perlindungan Sosial	Rp 134,5 triliun
Sektoral K/L dan Pemda	Rp 20,53 triliun
Insentif Usaha	Rp 22,23 triliun
Dukungan UMKM	Rp 58,74 triliun

Sumber: Kemenkeu (Diolah)
Grafis JOS

PILKADA SERENTAK TETAP 9 DESEMBER Tak Ingin Ada Kekosongan Pemimpin

JAKARTA (KR) - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tak akan ditunda. Menurutnya, pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, tidak bisa mengambil kebijakan strategis yang diperlukan dalam penanganan Covid-19.

"Pemerintah tidak ingin terjadi kekosongan pemimpin yang hanya dilakukan Plt sampai 200-an daerah dalam waktu bersamaan, karena Plt tidak boleh ambil kebijakan strategis," ujar Mahfud saat membuka Rapat

Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Selasa (22/9).

Menurut Mahfud, pengambilan kebijakan strategis itu diperlukan pada masa pandemi Covid-19. Dengan dijabat Plt, nantinya akan berimplikasi pada pergerakan birokrasi yang memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah strategis dalam penanganan Covid-19. Situasi itu ia sebut tak menguntungkan proses pemerintahan. "Maka akan kurang menguntungkan proses pemerintahan jika 270 daerah ditetapkan Plt

sampai waktu tidak jelas (kapan pandemi selesai)," jelasnya.

Mahfud menjelaskan, tidak ada satu pun pihak yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Oleh karena itu, jika memang ditunda dengan alasan tersebut, Pilkada 2020 tidak memiliki kepastian waktu pelaksanaannya. Dia pun bercermin ke negara Amerika Serikat, yang jumlah kasus Covid-19 jauh lebih banyak dari Indonesia, dalam pelaksanaan Pemilu.

* Bersambung hal 7 kol 1



Analisis KR (Tidak) Menunda Pilkada

Bambang EC Widodo MA

PILKADA 2020 sudah ditunda sekali dari harusnya dilaksanakan September 2020 ini diundur menjadi 9 Desember 2020. Penyebab utama adalah pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh dunia tidak hanya Indonesia. Penundaan pemilu terjadi hampir di seluruh dunia termasuk pilkada di Indonesia. Alasan di balik penundaan itu adalah laju penularan virus korona diharapkan sudah mereda. Faktanya laju penularan virus ini tetap masih tinggi. Dan risiko tidak terkendalinya laju penularan virus ini bisa menjadi ancaman serius terhadap sistem pelayanan kesehatan kita.

Dua ormas besar (NU dan Muhammadiyah) telah menyampaikan keprihatinannya dan meminta pemerintah menunda pilkada 2020. Banyaknya calon kepala daerah yang positif Covid-19. Banyak penyelenggara pemilu tertular Covid-19, menyadarkan kita bahwa tidak mudah mengendalikannya di lingkungan penyelenggaraan pilkada 2020. Kritik keras pada para paslon dan penyelenggara yang mengabaikan protokol Covid-19 dalam prosesi pendaftaran paslon di KPU menunjukkan tidak mudah menegakkan protokol kesehatan pada penyelenggaraan tahapan pilkada yang tersisa.

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:34	14:46	17:37	18:46	04:13

Rabu, 23 September 2020
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY



MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri maupun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ini para dermawan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuangan KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasional dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening BCA 126.556.5656 atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT. (Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA 081 2296 0972.

NO	NAMA	ALAMAT	RUPIAH
642	Sudayat Pemda Kab. Bantul		1,050,000.00
JUMLAH			Rp 1,050,000.00
Melalui Transfer			
643	Nadia Aya Azzahra		50,000.00
JUMLAH			Rp 50,000.00
JUMLAH			Rp 1,100,000.00
s/d 21 September 2020			Rp 357,160,000.00
s/d 22 September 2020			Rp 358,260,000.00

(Tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
Siapa menyusul?

TERIMA PENGHARGAAN DARI MENKEU

Pemda DIY Raih WTP 10 Kali Berturut-turut

YOGYA (KR) - Pemda DIY menerima penghargaan dan apresiasi dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan meraih 10 kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras Pemda DIY dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam sepuluh tahun terakhir.

Penghargaan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9). Wagub DIY Paku Alam X mengikuti acara tersebut secara daring dari Gedhong Pare Anom Kepatihan Yogyakarta, didampingi Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi

Umum Tri Saktiyana dan Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono.

"Terima kasih atas penghargaan ini, tetapi bagi saya

WTP itu bukannya menyelesaikan tugas, tetapi WTP itu berarti anggaran itu di-maintenance dengan benar sesuai regulasi Un-



Sri Sultan Hamengku Buwono X

dang Undang yang ada, sehingga Yogyakarta siap di-hantarkan untuk take off karena landasannya memenuhi standar," ujar Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X kepada KR.

Sultan HB X menyampaikan, ibaratnya pesawat Airbus A380 yang paling berat take off itu mampu landasannya. Artinya itu awal dari proses bagaimana masyarakat DIY lebih maju dan sejahtera, sehingga bukan akhir dari prestasi melainkan awal karena landasannya memenuhi standar.

"Jadi tidak hanya pesawat capung yang mendarat tetapi sudah pesawat Airbus mampu mendarat di DIY, kira-kira begitu. Jadi kalau DIY tidak meraih opini WTP itu yang namanya mundur," imbuh Raja Kraton Yogyakarta tersebut.

Sri Mulyani mengung-

kapkan, penghargaan ini diberikan berdasarkan review transparansi fiskal. Tahun ini, dari total 542 LKPD, 486 sudah WTP. Capaian ini tentu merupakan hal yang sangat positif, dan dinilai mampu menjawab tantangan akuntabilitas dalam penanganan pandemi Covid-19 serta memulihkan kondisi ekonomi.

Beny Suharsono menyatakan, penghargaan yang diperoleh DIY diharapkan bisa menjadi pemacu untuk berproses menjadi lebih baik, sehingga DIY akan terus meningkatkan pergerakan menuju pada akuntabilitas, transparansi, dan sinergitas dalam pengelolaan anggaran. Karena meraih WTP sepuluh kali berturut-turut adalah buah dari kerja keras bersama berbagai pihak,

* Bersambung hal 7 kol 1

Pemprov Jateng Raih WTP 5 Kali Beruntun

SEMARANG (KR) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama lima kali berturut-turut.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menekankan agar catatan bagus terkait WTP itu jangan dinodai dengan persoalan seperti korupsi, termasuk dalam mengelola dan mengamankan dana hasil refocusing untuk penanganan Covid-19. Hal itu dikatakan Gubernur Jateng di ruang kerjanya, Selasa (22/9).

Penghargaan diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membuka acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020

secara daring. Rakornas diikuti seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk Ganjar Pranowo yang sekaligus menerima penghargaan. Kemenkeu mem-

beri penghargaan bagi Pemda dalam dua kategori, yaitu yang telah meraih WTP lima kali dan sepuluh kali berturut-turut.

Menurut Ganjar, Pemprov Jateng sebenarnya

telah mendapat WTP sembilan kali berturut-turut. "Tadi kami mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan untuk kategori (WTP) lima tahun berturut-turut. Sebenarnya kami su-

dah sembilan tahun berturut-turut tetapi karena gradenya masih di bawah sepuluh maka terima kasih kami mendapatkan perhatian," kata Ganjar.

* Bersambung hal 7 kol 5



Ganjar Pranowo di ruang kerjanya menerima penghargaan dari Sri Mulyani secara daring.



● SAYA mendapat WA dari seorang pembeli HP: "Ini saya yang tadi malam beli HP, gimana caranya buka kunci pakai sidik jari? Saya coba kok tidak bisa?" Saya: "Sudah didaftarkan belum sidik jarnya?" Pembeli: "Belum je, berarti saya harus ke Polres ya? Bayar berapa?" Saya: "Ku menagiss...." (Nanang CN, Naruto Jalan Godeang Km 10 No 1 Sidoagung, Godean, Sleman 55564)-d